

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2017**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik dalam rangka mendukung budaya transparansi, merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program melalui pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap kegiatan, program, kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menjadi kesadaran mendalam, bahwa dalam pembuatan LKjIP ini masih banyak ditemui kekurangan. Untuk itu segala input konstruktif dan inovatif, sangat diharapkan guna kesempurnaan pelaksanaan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dimasa yang akan datang.

Akhirnya penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan LKjIP ini, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan perencanaan kebijakan selanjutnya.

Sumenep, 26 Januari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197703 1 014

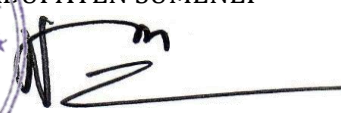
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep melaporkan capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2017 ini menunjukkan keberhasilan masing-masing tujuan dan sasaran, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kekurangan dan upaya perbaikan yang akan dilakukan telah diuraikan secara lengkap pada bagian evaluasi akuntabilitas kinerja.

Pada akhirnya, Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sumenep, 26 Januari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197703 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	5
E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan	6
F. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	7
G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategi.....	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017	13
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	15
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	16
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	17
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	30
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Tinjauan Umum	44
B. Tinjauan Khusus.....	44
C. Saran Tindak Lanjut	44
Daftar Lampiran	

DAFTAR TABEL

	<i>HALAMAN</i>
Tabel 1.1.1 Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	14
Tabel 1.2.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017	15
Tabel 1.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	16
Tabel 1.5.1 Alokasi Per sasaran Pembangunan	27
Tabel 1.5.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	28
Tabel 1.5.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
Tabel 2.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Perubahan APBD 2017	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja

Pembangunan pendidikan, pada hakikatnya merupakan proses pembangunan sosial-ekonomi dan budaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera lahir maupun batin. Atas dasar ini pemerintah selalu melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih positif, utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun ini pemerintah telah menggulirkan kurikulum baru, yakni kurikulum 2013 yang diimplementasikan sejak tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Yang muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan.

Wajib belajar merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan rata-rata penduduk. Peningkatan kualitas pendidikan rata-rata penduduk berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mobilitas sosial dan mewujudkan peran sertanya secara lebih signifikan dalam pembangunan nasional.

Meningkatnya mutu pendidikan akan memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan. Meningkatnya pembangunan pendidikan juga berarti meningkatkan kemampuan komunikasi antar penduduk. Hal ini merupakan, syarat mutlak pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah kepulauan.

Masalah pemerataan dalam memperoleh pendidikan terjadi karena perbedaan wilayah, daerah daratan dengan daerah kepulauan masih ada ketimpangan dan antara tingkat pendapatan penduduk yang menyebar di kabupaten Sumenep juga sangat beragam. Bersamaan dengan adanya otonomi sekolah, sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur semua aktifitasnya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam arti peran masyarakat sangat diperlukan dalam

menurunkan anak tidak memperoleh pendidikan, sehingga pemetaraan memperoleh pendidikan khususnya di kabupaten Sumenep dapat dicapai dengan ditandai kenaikan angka partisipasi.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di kabupaten Sumenep, secara simultan terus dilakukan, menyangkut pengembangan manusia seutuhnya, yakni aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, ketrampilan, seni, olahraga dan perilaku anak didik baik di sekolah maupun diluar sekolah. Pengembangan penekanan aspek tersebut diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (life skill) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi anak didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebijakan yang menonjol kearah itu antara lain diwujudkannya dalam bentuk pemahaman kurikulum tahun 2013 dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Model Kurikulum 2013 dan manajemen berbasis sekolah ini perlu dimantapkan penerapannya dengan lebih memberdayakan peran Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya, Peran Komite Sekolah dan pemberdayaan masyarakat dan orang tua peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat berperan.

Dalam rangka peningkatan mutu guru, langkah yang telah dan perlu dilanjutkan serta ditingkatkan adalah program implementasi Kurikulum 2013 dan program penyetaraan guru, terutama yang potensial dan masa tugasnya masih panjang. Sedangkan upaya peningkatan kemampuan guru adalah melalui penataran dan pelatihan. Dalam penataran dan pelatihan guru perlu ditingkatkan materi secara lebih matang dan menarik, kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk merancang suatu model dalam menjabarkan kurikulum 2013 yang lebih mengena dan bermanfaat bagi guru.

Untuk program Pendidikan Luar Sekolah, pendidikan luar biasa, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan serta manajemen pelayanan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan kearah kemandirian baik kemampuan pikir, fisik dan wawasan kemas depan, dengan mempertahankan dan menanamkan budaya local.

B. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan

- 1) Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 71 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 41 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

Bagian Pertama : Dinas Pendidikan

Pasal 2

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan satuan pendidikan sejenis dan Pendidikan Non Formal serta ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga kependidikan);
 - c. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, program pendidikan sederajat serta Ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan olahraga, seni serta kebudayaan bagi anak usia sekolah;
 - e. Pelaksanaan pengawasan tenaga pendidik, kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, serta pendidikan sederajat;
 - f. Pemberian pelayanan teknis dan administratif Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep secara struktural dibantu oleh :

Pasal 3 : (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Sekretariat
 - b. Bidang Pendidikan Dasar
 - c. Bidang Pendidikan Menengah
 - d. Bidang Ketenagaan dan Kepengawasan
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

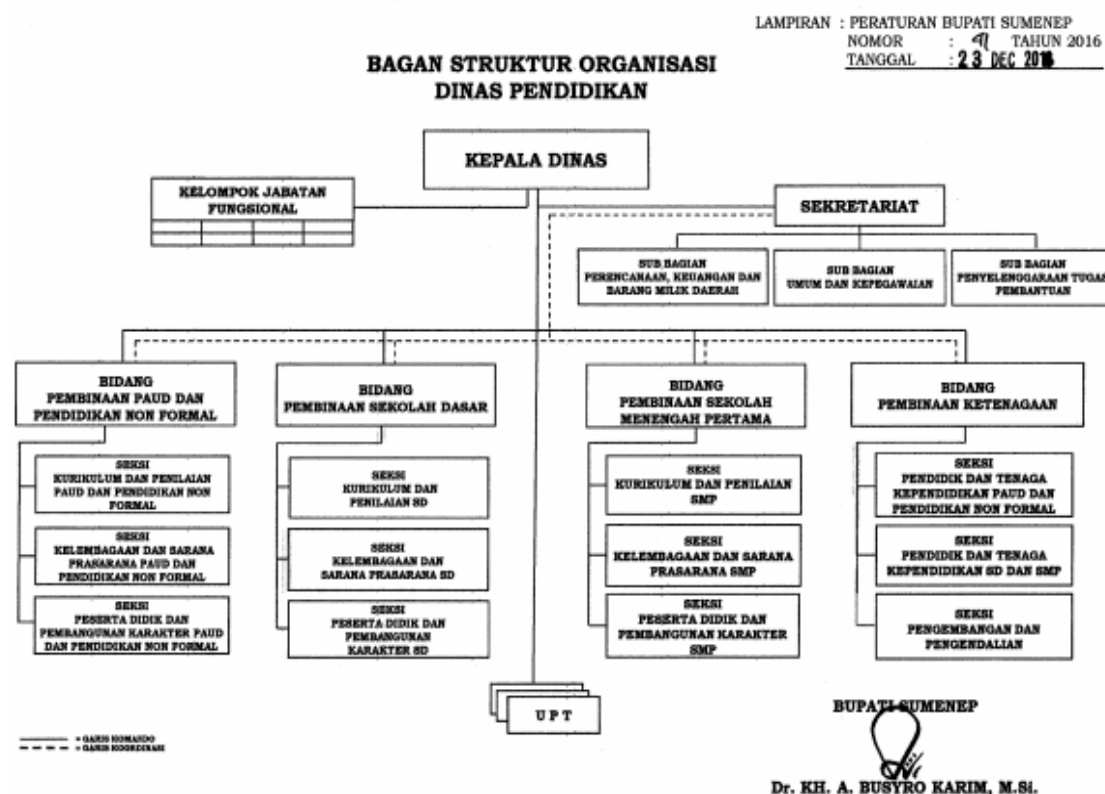
D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep serta karakteristik wilayah Kabupaten Sumenep, maka wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan, lingkup Satuan Pendidikan Formal dan Informal dengan komposisi :

- 27 UPT Pendidikan Kecamatan
- 172 Sekolah Menengah Pertama
- 648 Sekolah Dasar
- SKP Batuan
- TK Pembina Kota
- TK Pembina Pragaan

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 41 Tahun 2016 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Sebagaimana struktur Dinas Pendidikan terlampir,



E. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata layanan pendidikan bagi sekolah yang berkeunggulan dan berkinerja rendah
2. Peningkatan kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan SD/MI;
3. Pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan formal di jenjang SMP/MTs (lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs).
4. Menjamin keberlanjutan pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI serta SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut;
5. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu/sekolah satu atap (SMP di SD Negeri,);
6. Peningkatan prestasi nilai UN untuk SD/MI dan UN SMP, melalui peningkatan proses pembelajaran.
7. Peningkatan kualifikasi, kualitas kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs.
9. Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan revitalisasi ruang kelas pada jenjang satuan pendidikan, khususnya pada jenjang di SD/MI, SMP/MTs guna mencapai penuntasan target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
10. Pembangunan unit sekolah baru dan meningkatkan kuantitas kelembagaan dan ruang belajar SD/MI dan SMP/MTs.;
11. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung berpotensi pada peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas RI No.24/2007, termasuk buku ajar (referensi/pegangan), modul, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dll;
12. Pemanfaatan dan pemantapan hasil akreditasi bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
13. Terlaksananya akselerasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, terutama di ibu kota kecamatan, sekaligus menjadikannya sebagai sekolah model;
14. Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional) bagi penyandang buta aksara usia 45 tahun lebih untuk menuntaskan tiga buta (buta

aksara latin dan angka, buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar) dan usia 15 tahun dapat menyelesaikan program keaksaraan fungsional tingkat lanjutan/mandiri.

15. Peningkatan jumlah sekolah inklusif dan PLB dalam mewujudkan perluasan layanan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
16. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama dan sinergi
17. Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang seni dan olah raga.
18. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan baik vertikal maupun horisontal;
19. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berbasis website on line system dalam penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen;
20. Peningkatan tata layanan pendidikan non formal untuk Paket A, B dan C;
21. Peningkatan kuantitas, kualitas dan penyebaran layanan pendidikan kesetaraan;
22. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan minimal memiliki atau berkualifikasi Sarjana (D IV), khususnya pada tingkat SD/MI;
23. Peningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi guru olahraga, pelatih, praktisi dan teknisi olahraga khususnya yang berstandar nasional dan propinsi;

F. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pencapain pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program pendidikan usia dini
4. Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun
5. Program pendidikan menengah
6. Program pendidikan non formal

7. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
8. Program manajemen pelayanan pendidikan
9. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
10. Program peningkatan peran serta kepemudaan
11. Program pengelolaan keragaman budaya
12. Program peningkatan kualitas siswa

Yang mana keseluruhan program tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia telah sesuai dengan RKPD.

G. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendidikan.

Sehingga untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan anak usia dini yang terdiri dari tempat penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak dan satuan pendidikan sejenis dan pendidikan non formal serta ketenagaannya (pendidik dan tenaga kependidikan);
3. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, program pendidikan sederajat serta ketenagaannya (pendidik dan tenaga kependidikan);
4. Pembinaan dan pelaksanaan olah raga, seni serta kebudayaan bagi anak usia sekolah;
5. Pelaksanaan pengawasan tenaga pendidik, kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD, pendidikan non formal, pendidikan dasar, serta pendidikan sederajat;
6. Pemberian pelayanan teknis dan administratif unit pelaksana teknis pendidika;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep bergerak dan melaksanakan pelayanan bidang pendidikan berdasarkan tupoksi serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemenuhan pelayanan administrasi kantor, merupakan pemecah masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI DINAS PENDIDIKAN

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang ingin dicapai. Visi ditetapkan atas dasar pemahaman bersama, merupakan suatu gambaran prospek masa depan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam perumusannya, Visi Kabupaten Sumenep adalah :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Bapak Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Dan Daratan Yang Didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Yang Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.
4. Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel.
5. Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman Dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat Serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.
6. Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Serta Nasionalisme Yang Didukung Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, termasuk pada misi pertama yaitu ***“Meningkatkan Pemerataan Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan”***.

2. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Pemerataan Pendidikan dan Perluasan Akses Pendidikan

2. Sasaran :

Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan Meningkatkan Akses Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Indeks Pendidikan :	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	%	5,2	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
			APK tkt PAUD	%	75,00	
			APK tkt SD/MI	%	120,00	
			APK tkt SMP/MTS	%	116,27	
			APK tkt SMA/SMK/MA	%	116	
			Angka Partisipasi Murni (APM) :			
			APM tkt PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	%	71,00	
			APM tkt SD/MI/Paket A	%	109,12	
			APM tkt SMP /MTs / P.B	%	90,89	
			APM tkt SMA/SMK	%		
			Angka Putus Sekolah (APS)			
			SD/MI	%	0,52	
			SMP/MTs	%	0,54	
	SMA/SMK/MA	%				
			Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	%	13,03
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional		
				SD/MI	%	6,53
				SMP/MTs	%	6,67
				SMA/SMK/MA	%	
				Angka Kelulusan		
				SD/MI	%	99,05
				SMP/MTs	%	94,78
				SMA/SMK/MA	%	
				Angka Melanjutkan		
				SD/MI ke SMP/MTs	%	91,98
				SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	94,86
	Angka Harapan Melk Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	Meningkatnya Angka Harapan Melk Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	83,05	
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruh (tidak buta huruf)			Warga	800.433		
Jumlah Lembaga PNF berizin			%	60		

Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi:	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi		2
		Sekolah pendidikan PAUD kondisi bangunan baik	%	18,00
	Persentase SD/MI yang berakreditasi A	Persentase SD/MI yang berakreditasi A	%	8
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	64,48
		Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:2
		Rasio Guru per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:28
		Rasio murid per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:44
		Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SD/MI	%	69,17
		Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SD/MI	%	62,59
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		%	75,76
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SMP/MTS		Rasio	1:2
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SMP/MTS		Rasio	1:32
	Rasio murid per kelas rata-rata: SMP/MTS		Rasio	1:47
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SMP/MTs		%	99,3
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SMP/MTs		%	76,25
	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi A	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	75,4
	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah dengan menetakannya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat yang dikukuhkan dalam Intruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, dengan maksud setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya didalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta segala permasalahan dan upaya pemecahannya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun analisis dari capaian kinerja bidang pendidikan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target tahun 2017 dan realisasi kinerja tahun 2017
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
- 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sumenep yaitu merupakan ukuran capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan menghasilkan nilai rata-rata sebesar 122,93 %, ini termasuk predikat **Sangat Berhasil**.

Tabel 1.1.1.
Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	%	5,2	BPS	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
	APK tkt PAUD	%	75,00	81,18	108,24
	APK tkt SD/MI	%	120,00	122,94	102,45
	APK tkt SMP/MTS	%	116,27	118,06	101,54
	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
	APM tkt PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	%	71,00	80,67	113,62
	APM tkt SD/MI/Paket A	%	109,12	113,37	103,89
	APM tkt SMP /MTs / P.B	%	90,89	99,03	108,96
	Angka Putus Sekolah (APS)				
	SD/MI	%	0,52	0,25	48,08
SMP/MTs	%	0,54	0,37	68,52	
Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	%	13,03	BPS	
	Nilai Rata-rata Ujian Nasional				
	SD/MI	%	6,53	7,02	107,50
	SMP/MTs	%	6,67	6,95	104,20
	Angka Kelulusan				
	SD/MI	%	99,05	99,17	100,12
	SMP/MTs	%	94,78	99,18	104,64
	Angka Melanjutkan				
	SD/MI ke SMP/MTs	%	91,98	105,54	114,74
	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	94,86	93,87	98,96
Meningkatnya Angka Harapan Melk Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	83,05	93,91	113,08
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruh (tidak buta huruf)	Warga	800.433	860.596	107,52
	Jumlah Lembaga PNF berizin	%	60	70	116,67
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	%	2	5,89	294,50
	Sekolah pendidikan PAUD kondisi bangunan baik	%	18,00	43,03	239,06
Persentase SD/MI yang berakreditasi A	Persentase SD/MI yang berakreditasi A	%	8	9,13	114,13
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	64,48	67,86	105,24
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:2	1:2	100
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:28	1:28	100
	Rasio murid per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:44	1:28	84,62
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SD/MI	%	69,17	147,82	213,71
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SD/MI	%	62,59	64,90	103,69
	Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	%	20	33,34	166,70
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	75,76	87,76	115,84
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SMP/MTS	Rasio	1:2	1:3	101,61
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SMP/MTS	Rasio	1:32	1:32	100
	Rasio murid per kelas rata-rata: SMP/MTS	Rasio	1:47	1:32	85,98
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SMP/MTs	%	99,3	124,54	125,42
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SMP/MTs	%	76,25	97,58	127,97
	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi A	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	75,4	80,81
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	25,00	24,29	97,16

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 1.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2017	Realisasi	
			Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5
Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	5,2	BPS	BPS
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
	APK tkt PAUD	75,00		81,18
	APK tkt SD/MI	120,00	118,11	122,94
	APK tkt SMP/MTS	116,27	110,55	118,06
	Angka Partisipasi Murni (APM) :			
	APM tkt PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	71,00		80,67
	APM tkt SD/MI/Paket A	109,12	108,56	113,37
	APM tkt SMP /MTs / P.B	90,89	97,17	99,03
	Angka Putus Sekolah (APS)			
	SD/MI	0,52	0,28	0,25
SMP/MTs	0,54	0,31	0,37	
Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	13,03	BPS	BPS
	Nilai Rata-rata Ujian Nasional			
	SD/MI	6,53	0,28	7,02
	SMP/MTs	6,67	0,31	6,95
	Angka Kelulusan			
	SD/MI	99,05	99,20	99,17
	SMP/MTs	94,78	98,53	99,18
	Angka Melanjutkan			
	SD/MI ke SMP/MTs	91,98	136,12	105,54
	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	94,86	108,78	93,87
Meningkatnya Angka Harapan Melk Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	83,05	70,00	93,91
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruh (tidak buta huruf)	800.433	860.596	860.596
	Jumlah Lembaga PNF berizin	60		70
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	2		5,89
	Sekolah pendidikan PAUD kondisi bangunan baik	18,00	71,36	43,03
Persentase SD/MI yang berakreditasi A	Persentase SD/MI yang berakreditasi A	8	70,10	9,13
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	64,48	58,76	67,86
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SD/MI	1:2	1:2	1:2
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SD/MI	1:28	1:27	1:28
	Rasio murid per kelas rata-rata: SD/MI	1:44	1:28	1:28
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SD/MI	69,17	136,12	147,82
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SD/MI	62,59	57,77	64,90
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	20	72,20	33,34
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	75,76	69,76	87,76
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SMP/MTS	1:2	1:3	1:3
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SMP/MTS	1:32	1:32	1:32
	Rasio murid per kelas rata-rata: SMP/MTS	1:47	1:32	1:32
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SMP/MTs	99,3	108,78	124,54
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SMP/MTs	76,25	80,44	97,58
Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi A	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	75,4	71,80	80,81
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	25,00		24,29

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 1.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2020	Realisasi Tahun 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	%	5,2	BPS	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
	APK tkt PAUD	%	75,00	81,18	108,24
	APK tkt SD/MI	%	120,00	122,94	102,45
	APK tkt SMP/MTS	%	116,27	118,06	101,54
	Angka Partisipasi Murni (APM) :				
	APM tkt PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	%	71,00	80,67	113,62
	APM tkt SD/MI/Paket A	%	109,12	113,37	103,89
	APM tkt SMP /MTs / P.B	%	90,89	99,03	108,96
	Angka Putus Sekolah (APS)				
SD/MI	%	0,52	0,25	48,08	
SMP/MTs	%	0,54	0,37	68,52	
Meningkatnya Angka Rata-rata lama Sekolah	Harapan Lama sekolah	%	13,03	BPS	
	Nilai Rata-rata Ujian Nasional				
	SD/MI	%	6,53	7,02	107,50
	SMP/MTs	%	6,67	6,95	104,20
	SMA/SMK/MA	%			
	Angka Kelulusan				
	SD/MI	%	99,05	99,17	100,12
	SMP/MTs	%	94,78	99,18	104,64
	Angka Melanjutkan				
	SD/MI ke SMP/MTs	%	91,98	105,54	114,74
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	94,86	93,87	98,96	
Meningkatnya Angka Harapan Melk Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	%	83,05	93,91	113,08
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruh (tidak buta huruf)	Warga	800.433	860.596	107,52
	Jumlah lembaga PNF berizin	%	60	70	116,67
Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	Persentase lembaga PAUD formal terakreditasi	%	2	5,89	294,50
	Sekolah pendidikan PAUD kondisi bangunan baik	%	18,00	43,03	239,06
Pesentase SD/MI yang berakreditasi A	Persentase SD/MI yang berakreditasi A	%	8	9,13	114,13
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	64,48	67,86	105,24
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:2	1:2	100,00
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:28	1:28	100,00
	Rasio murid per kelas rata-rata: SD/MI	Rasio	1:44	1:28	84,62
	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SD/MI	%	69,17	147,82	213,71
Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SD/MI	%	62,59	64,90	103,69
	Persentase SMP/MTS yang berakreditasi A	%	20	33,34	166,70
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	75,76	87,76	115,84
	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah SMP/MTS	Rasio	1:2	1:3	101,61
	Rasio Guru per kelas rata-rata: SMP/MTS	Rasio	1:32	1:32	100,00
	Rasio murid per kelas rata-rata: SMP/MTS	Rasio	1:47	1:32	85,98
Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi A	Guru Yang memenuhi standar Mutu Kependidikan SMP/MTs	%	99,3	124,54	125,42
	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV SMP/MTs	%	76,25	97,58	127,97
	Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	%	75,4	80,81	107,18
Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	Persentase lembaga PNF yang berakreditasi	%	25,00	24,29	97,16

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2.1 di atas sasaran tersebut didukung oleh 23 indikator sasaran. Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, target rata-rata lama sekolah tahun 2017 sebesar 5,2 % sedangkan untuk tahun 2017 sampai saat ini kami belum menerima laporan dan sudah koordinasi dengan BPS Sumenep, capaian kinerja tahun 2017 masih menunggu dari BPS hal ini disebabkan karena dinas pendidikan tidak punya data pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk (seperti jumlah penduduk yang berijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan PT)

a. Angka Partisipasi Kasar

1. Indikator Angka partisipasi kasar Paud Formal

Untuk tahun 2017 ditetapkan target sebesar 75% dan terealisasi sebesar 81,18% yakni sebanyak 35.203 anak usia dini dengan penduduk usia 4 – 6 tahun sebanyak 43.638 anak, maka capaian kinerjanya sebesar 108,24%. bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 26,64 % ada peningkatan sebesar 81,60 % hal ini didorong dengan adanya peningkatan lembaga baru PAUD di masing-masing kecamatan.

2. Indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

Pada tahun 2017 jumlah penduduk berusia 7-12 tahun sebanyak 94,809 orang, sedangkan jumlah siswa SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 107,487 anak, sehingga APK SD/MI/paket A tahun 2017 sebesar 122,94% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 120 % yakni mencapai 102,45% dari target. Bila dibandingkan dengan APK pada tahun 2016 sebesar 118,11% mengalami peningkatan sebesar 4,83%, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar cukup signifikan dan program KB (dua anak cukup) juga berhasil.

3. Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

Jumlah siswa yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2017 sebanyak 51.874 siswa, sedangkan jumlah penduduk

berusia 13-15 tahun 2017 sebanyak 52.389 anak. Dengan demikian APK Tingkat SMP/MTs tahun 2017 sebesar 118,06% atau berada di atas target yang ditetapkan sebesar 118% yakni mencapai 100,05% dari target. Sedangkan bila dibandingkan dengan APK tahun 2014 sebesar 101,5% mengalami peningkatan sebesar 16,56%. Peningkatan APK SMP/MTs disebabkan karena adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan berhasil, dan sudah optimalnya sosialisasi pentingnya pendidikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

b. Angka Partisipasi Murni

1. Indikator Angka partisipasi Murni Paud Formal (usia 5-6)

Untuk tahun 2017 ditetapkan target sebesar 71% dan terealisasi sebesar 80,67% dan juga melebihi target pada tahun 2017 sesuai dengan yang telah ditetapkan maka capaian kinerjanya sebesar 113,62%, hal tersebut digunakan untuk mengukur persentase perbandingan angka partisipasi kasar anak Usia jenjang Paud 5 – 6 tahun terhadap jumlah penduduk dalam usia sekolah 5 - 6 tahun pada periode yang sama.

2. Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

Realisasi APM untuk jenjang SD/MI tahun 2017 sebesar 113,37%, yaitu jumlah siswa SD/MI berusia 7-12 sebanyak 107.487 siswa dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 94.809 anak. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar 109,12% sehingga pencapaian target kinerja APM sebesar 103,89%. Atau berada diatas target, Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dan manfaat pendidikan terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat cukup tinggi

3. Indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2017 sebanyak 51.874 siswa, sedangkan jumlah penduduk berusia 13-15 tahun 2017 sebanyak 52.389 anak. Dengan demikian APM Tingkat SMP/MTs tahun 2017 sebesar 99,03%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 98% maka capaian kinerjanya sebesar 101,05% atau berada diatas target. Bila dibandingkan dengan capaian APM tahun 2014 sebesar 95,8% mengalami peningkatan sebesar 3,23% Hal ini disebabkan dikarenakan jumlah siswa yang bersekolah di SMP/MTs cukup tinggi dalam arti kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terasa manfaatnya baik untuk dirinya maupun

untuk lingkungannya. Dan juga didukung adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) besar sekali manfaatnya, utamanya terhadap anak dari keluarga miskin dalam mengenyam pendidikannya yang lebih tinggi.

c. Angka Putus Sekolah

1. Angka Putus Sekolah SD/MI

Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebanyak 263 siswa dari jumlah 104,482 siswa atau sebesar 0,25%. Dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 0,54% maka capaian kinerjanya mencapai 51,85% atau berada di atas target. Salah satu faktor yang menyebabkan putus sekolah ini adalah adanya faktor ekonomi, sulitnya transportasi dan budaya kawin muda. Bila dibandingkan dengan Angka putus sekolah tahun 2016 sebesar 0,54% maka terdapat penurunan angka putus sekolah sebesar 0,29%. terutama didorong oleh kebijakan/program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).dan Program Beasiswa Siswa Miskin, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan ke jenjang selanjutnya.

2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs putus sekolah tahun 2017 sebanyak 196 siswa dari jumlah siswa yang ada sebanyak 52.965 siswa atau mencapai 0,33%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 0,31% maka capaian kinerjanya mencapai 58,49% atau berada di atas target. Kondisi yang menyebabkan anak putus sekolah secara umum adalah faktor ekonomi, sulitnya transportasi dan budaya kawin muda, namun dilapangan partisipasi masyarakat cukup tinggi terhadap pendidikan. Dan didorong oleh kebijakan/program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Beasiswa Siswa Miskin

2) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang Angka Harapan Lama Sekolah di suatu daerah (Kabupaten/Kota) serta adanya akses pemerataan layanan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di masing-masing kecamatan.

Kesimpulannya Semakin besar Akses pelayanan pendidikan yang diberikan akan semakin besar angka harapan lama sekolah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang diterima oleh masyarakat.

Target tahun 2017 sebesar 13,03 dan terealisasi sebesar 11,05 yang capaiannya sebesar 95% hal ini di dukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung,

a. Nilai Rata-rata Ujian Nasional

1. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/MI

Nilai rata-rata Ujian Nasional pada tingkat SD/MI di dasarkan pada Nilai rata-rata mata pelajaran yang di ujikan Dari jumlah peserta ujian yang di targetkan sebesar 6.53 dan terealisasi sebesar 7.02 capaiannya sebesar 107.50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 6.35 maka dan terealisasi 0.28 capaian kinerja tahun 2016 sebesar 4.41% atau berada di atas target. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka sangat tinggi. Dan juga didukung dengan adanya Try Out Ujian sekolah berkat adanya Program bantuan dana BOS.

2. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs

Nilai rata-rata Ujian Nasional pada tingkat SMP/MTs di dasarkan pada Nilai rata-rata mata pelajaran yang di ujikan Dari jumlah peserta ujian yang di targetkan sebesar 6.67 dan terealisasi sebesar 6.95 capaiannya sebesar 104.20%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 6.55 maka dan terealisasi 0.31 capaian kinerja tahun 2016 sebesar 4.73% atau berada di atas target. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka sangat tinggi. Dan juga didukung dengan adanya Try Out Ujian sekolah berkat adanya Program bantuan dana BOS

b. Angka Kelulusan

1. Angka Kelulusan SD/MI

Indikator ini adalah untuk menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dibanding dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100.12%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100.87%. hal ini di dukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan Bimsus dan Try out ujian di tiap lembaga masing-masing penyelenggara pendidikan.

2. Angka Kelulusan SMP/MTs

Indikator ini adalah untuk menggambarkan tingkat keberhasilan siswa yaitu dengan membandingkan jumlah siswa yang lulus dibanding dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 104.64%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 menghasilkan capaian kinerja sebesar 105.13%. hal ini di dukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan Bimsus dan Try out ujian di tiap lembaga masing-masing penyelenggara pendidikan.

c. Angka Melanjutkan

1. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa yang lulus SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 16.953 siswa. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat SMP/MTs sebanyak 17.892 siswa atau mencapai nilai sebesar 77,04%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 90,81% maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 149,90% atau berada di atas target. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka sangat tinggi. Dan juga didukung dengan adanya Program bantuan dana BOS

2. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa yang lulus SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 15.200 siswa. Dari jumlah tersebut, jumlah siswa yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK sebanyak 14.268 siswa atau mencapai 92,27%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 93,66% maka capaian kinerja tahun 2016 sebesar 108,78% atau berada di atas target. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi putra/putri mereka cukup tinggi.

3) MELEK HURUF

a. Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Target / garapan warga belajar buta huruf tahun 2017 sebanyak 83.05%, sedangkan garapan buta huruf tahun 2017 mencapai 93,91%, capaian kinerja tahun 2017 sebesar 113.08 % atau diatas target, hal ini di dukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung, didalam

penyelenggaraan KBM pada kelompok belajar masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tutor sebagai katalisator, motivator dan pembimbing warga belajar. Dukungan pemerintah cukup tinggi juga dalam hal dukungan keuangan untuk pembelajaran KF (keaksaraan Fungsional) Dan dari partisipasi masyarakat terlihat dari antusiasnya untuk mengikuti proses belajar mengajar baik KF (keaksaraan Fungsional) maupun Kesetaraan, adanya semangat dan kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini secara keseluruhan dan berkesinambungan cukup tinggi. Disamping itu juga adanya kerja sama dengan Organisasi PKK Pemerintah Kabupaten, serta Darma Wanita dan juga dengan Persit Kartika candra kirana, Bayangkari, Nasyatul Aisyiah, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM di setiap kecamatan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan di kab. Sumenep, cukup baik dan lancar.

b. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta huruf)

Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pendidikan di suatu daerah (Kabupaten/Kota) serta adanya akses pemerataan layanan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, termasuk didalamnya program KF (Keaksaraan Fungsional) di masing-masing kecamatan.

Kesimpulannya Semakin besar garapan angka buta huruf yang dicapai berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis/ melek huruf yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih banyak yang diterima oleh masyarakat.

Target / garapan warga belajar buta huruf tahun 2017 sebanyak 800.433 warga, sedangkan garapan buta huruf tahun 2017 mencapai 860.596 warga, capaian kinerja tahun 2017 sebesar 107.52% keberhasilan ini di dukung oleh ketersediaan sarana belajar di masyarakat oleh pemerintah cukup tinggi dan juga keterlibatan guru-guru SD serta tokoh masyarakat sebagai tutor sangat efektif dan mendukung, didalam penyelenggaraan KBM pada kelompok belajar masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi tutor sebagai katalisator, motivator dan pembimbing warga belajar. Dukungan pemerintah cukup tinggi juga dalam hal dukungan keuangan untuk pembelajaran KF (keaksaraan Fungsional) Dan dari partisipasi

masyarakat terlihat dari antusiasnya untuk mengikuti proses belajar mengajar baik KF (keaksaraan Fungsional) maupun Kesetaraan, adanya semangat dan kesadaran dari warga belajar untuk mengikuti program ini secara keseluruhan dan berkesinambungan cukup tinggi. Disamping itu juga adanya kerja sama dengan Organisasi PKK Pemerintah Kabupaten, serta Darma Wanita dan juga dengan Persit Kartika candra kirana, Bayangkari, Nasyatul Aisyiah, Muslimat NU, Aisyiah, PGRI dan PKBM disetiap kecamatan yang dikelola oleh dinas pendidikan dan yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan di kab. Sumenep, cukup baik dan lancar.

c. Indikator Jumlah Lembaga PNF berizin

Tahun 2017 diadakan data jumlah lembaga PNF berizin, yang mana di tahun-tahun sebelumnya belum diadakan program pendataan lembaga PNF yang berizin. di tahun 2017 ditargetkan 60%, realisasinya mencapai 70% yang mana capaiannya 166,67%, di tahun 2017 melebihi target yang di tetapkan untuk menunjang keberhasilan masyarakat berpendidikan

4) PERSENTASE JUMLAH SEKOLAH TERAKREDITASI:

a. Persentase Lembaga Paud Terakreditasi

1. Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi

Tahun 2017 persentase lembaga PAUD terakreditasi, yang mana tahun sebelum-belumnya belum ada PAUD formal yang terakreditasi, untuk tahun 2017 ditargetkan 2 % lembaga, namun realisasinya melebihi target yang diharapkan sampai mencapai 5,89%, sehingga capaian untuk Tahun 2017 mencapai 294%.

2. Lembaga PAUD Kondisi Bangunan Baik

Tahun 2017 persentase lembaga PAUD dalam Kondisi bangunan baik, untuk tahun 2017 ditargetkan 18 % lembaga, dan terealisasi sebesar 43.03% melebihi target yang diharapkan sampai mencapai 239.06%, hal ini di sebabkan minat warga terhadap pendidikan anak di usia dini sangat meningkat pesat sehingga berpengaruh besar terhadap penyediaan sarana dan prasarana Paud banyak di perhatikan

b. Persentase Lembaga SD/MI Terakreditasi

1. Prosentase lembaga SD/MI Terakreditasi A

Tahun 2017 SD yang berakreditasi A dari target 8%, realisasinya mencapai 9,13% yang mana capaiannya 114%, Dari semua sekolah SD

berjumlah 648, yang mana tahun-tahun sebelumnya masih dicanangkan program SD yang berakreditasi B

2. Lembaga SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini mengukur jumlah sekolah SD/MI kondisi bangunan baik dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sekolah SD/MI yang ada. Untuk tahun 2017 jumlah sekolah SD/MI kondisi bangunan/ rombongan belajar baik pencapaian target tahun 2017 sebesar 105.24% sedangkan pencapaian target tahun 2016 sebesar 87.28. Pencapaian target dan keberhasilan ini disebabkan pemerintah kabupaten telah merehabilitasi / memperbaiki bangunan sekolah/ rombongan belajar yang mengalami kerusakan cukup signifikan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari DAK

3. Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar SD/MI dengan ketersediaan jumlah Sekolah pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Rasio Guru Per kelas

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah Guru SD/MI dengan Jumlah Murid SD/MI pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 mengalami hampir sama tidak ada perubahan, namun bila dibandingkan dengan kondisi riil dilapangan ketersediaan guru pada lembaga SD/MI cukup memadai artinya tidak akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah

5. Rasio Murid per kelas

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah Guru SD/MI dengan Jumlah Murid SD/MI pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 84.62%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 sebesar 83.81 yang mana mengalami peningkatan hal ini di sebabkan adanya penambahan ruang kelas baru dan minat wargan akan pentingnya pendidikan.

6. Guru yang memenuhi Standar Mutu Kependidikan SD/MI

Pada tahun 2017 prosentase PTK yang mengikuti diklat pada tahun yang sama. Sasaran yang ditetapkan 2017 dari target 69.17%,

realisasinya mencapai 147.82% yang mana capaiannya 213.71%, yang Minat akan pentingnya berbagai diklat yang mana banyak di dukung oleh pihak-pihak lembaga pendidikan

7. Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV SD/MI

Pada tahun 2017 persentase jumlah guru yang mempunyai kualifikasi S-1/ D-IV dibandingkan dengan jumlah guru yang tidak mempunyai kualifikasi S-1/D-IV pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 103.69%. Apabila dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 92.30 % mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran para guru untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi sangat tinggi, hal ini didukung dengan persyaratan untuk memperoleh tunjangan sertifikasi salah satunya adanya guru minimal harus berijasah S-1 atau D-4

c. Persentase Lembaga SMP/MTs Terakreditasi

1. Prosentase lembaga SMP/MTs Terakreditasi A

Tahun 2017 dari semua jumlah sekolah SMP sebanyak 172 lembaga, persentase lembaga SMP yang berakreditasi A di tahun 2017 ditargetkan 20%, realisasinya mencapai 33,34% yang mana capaiannya 166,7%, yang mana tahun-tahun sebelumnya masih dicanangkan program SMP yang berakreditasi B. Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas di tingkat SMP.

2. Lembaga SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini mengukur jumlah sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sekolah SMP/MTs yang ada. Untuk tahun 2017 jumlah sekolah SMP/MTs kondisi bangunan/ rombel baik pencapaian target tahun 2017 sebesar 115.84% sedangkan pencapaian target tahun 2016 sebesar 80.11. Pencapaian target dan keberhasilan ini disebabkan pemerintah kabupaten telah merehabilitasi / memperbaiki bangunan sekolah/ rombel yang mengalami kerusakan cukup signifikan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari DAK

3. Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar SD/MI dengan ketersediaan jumlah Sekolah pada tahun yang sama. Indikator

sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 101.61%.

4. Rasio Guru Per kelas

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah Guru SMP/MTs dengan Jumlah Murid SMP/MTs pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 mengalami hampir sama tidak ada perubahan, namun bila dibandingkan dengan kondisi riil dilapangan ketersediaan guru pada lembaga SD/MI cukup memadai artinya tidak akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah

5. Rasio Murid per kelas

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perbandingan jumlah Guru SMP/MTs dengan Jumlah Murid SMP/MTs pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 85.98%. Apabila dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2016 sebesar 85.19% yang mana mengalami peningkatan hal ini di sebabkan adanya penambahan ruang kelas baru dan minat wargan akan pentingnya pendidikan.

6. Guru yang memenuhi Standar Mutu Kependidikan SD/MI

Pada tahun 2017 prosentase PTK yang mengikuti diklat pada tahun yang sama. Sasaran yang ditetapkan 2017 dari target 99.3% realisasinya mencapai 124.54% yang mana capaiannya 125.42%, yang Minat akan pentingnya berbagai diklat yang mana banyak di dukung oleh pihak-pihak lembaga pendidikan

7. Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV SD/MI

Pada tahun 2017 persentase jumlah guru yang mempunyai kualifikasi S-1/ D-IV dibandingkan dengan jumlah guru yang tidak mempunyai kualifikasi S-1/D-IV pada tahun yang sama. Indikator sasaran yang ditetapkan tahun 2017 menghasilkan capaian kinerja sebesar 127.97%. Apabila dengan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 105.50 % mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran para guru untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi sangat tinggi, hal ini didukung dengan persyaratan untuk memperoleh tunjangan sertifikasi salah satunya adanya guru minimal harus berijasah S-1 atau D-4

d. Persentase Lembaga SMA/MAN Terakreditasi

Tahun 2017 dari semua jumlah sekolah SMA/MAN, persentase lembaga SMA/MAN yang berakreditasi A di tahun 2017 ditargetkan 75.4%, realisasinya mencapai 80.81% yang mana capaiannya 107.18%, yang mana tahun-tahun sebelumnya masih dicanangkan program SMA/MAN yang berakreditasi B. Demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas di tingkat SMA/MAN.

e. Indikator Prosentase lembaga PNF yang berakreditasi

Pada tahun 2017 prosentase PNF yang berakreditasi pada tahun yang sama, yang mana tahun-tahun sebelumnya masih belum ada program lembaga PNF yang berakreditasi. Sasaran yang ditetapkan 2017 dari target 25%, realisasinya mencapai 24,29% yang mana capaiannya 97,16%. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya lembaga PNF agar dapat terakreditasi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam Mengukur Analisa Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dilakukan Evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :

5.1 Cost Per Outcome

Tabel 1.5.1
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	1.371.266.000,00	1,33%
	Angka Rata-rata lama Sekolah	2.773.640.296,00	2,69%
	Angka Harapan Melek Huruf > 15 Tahun s.d 55 Tahun	1.187.823.000,00	1,15%
	Persentase Jumlah Sekolah Terakreditasi:	97.725.856.700,00	94,83%
Jumlah		103.058.585.996,00	100%

5.2 Cost Per Outcome

Tabel 1.5.2
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Anggaran			Kinerja		
		Alokasi	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar	%Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar	100%	86%	86%	27.081.163.246,00	18.025.127.350,00	67%
Program 1.1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
Program 1.2 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
Program 1.3 : Program Peningkatan Kualitas Siswa							
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama	%Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama	100%	97%	97%	1.920.984.300,00	1.810.187.925,00	94%
Program 2.1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
Program 2.2 : Program Pendidikan Menengah							
Program 2.3 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
Program 2.4 : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							
Sasaran 3 : Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	%Kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	95%	95%	2.749.997.750,00	2.468.262.350,00	90%
Program 3.1 : Program Pendidikan Anak Usia Dini							
Program 3.2 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							

Program 3.3 : Program Pendidikan Menengah							
Program 3.4 : Program Pendidikan Non Formal							
Program 3.5 : Program Pembinaan dan Pemasayanan Olah Raga							
Program 3.5 : Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
Sasaran 4 : Meningkatnya pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	%pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	100%	99%	99%	8.508.490.500,00	8.102.088.500,00	95%
Program 4.1 : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
Program 4.2 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
Sasaran 5 : Meningkatnya sistem penyelenggaraan pembantuan Pada tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan	%penyelenggaraan pembantuan Pada tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan	95%	90%	95%	62.797.950.200,00	59.010.867.508,00	94%
Program 5.1 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
Program 5.2 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
Program 5.3 : Program Peningkatan Kualitas Siswa							
Jumlah					103.058.585.996,00	89.416.533.633,00	

5.3 Cost Per Outcome

Tabel 1.5.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar	%Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar	86%	67%	20%
Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama	%Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama	100%	97%	3%
Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	%Kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	95%	90%	6%
Meningkatnya pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	%pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	99%	95%	4%
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pembantuan Pada tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan	%penyelenggaraan pembantuan Pada tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan	95%	94%	1%

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan Tabel 1.5.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran di atas terdapat 5 sasaran. Secara terinci analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar, Didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Lomba Olimpiade Mata Pelajaran Siswa dan Olimpiade MIPA dengan Output Lembaga SD/MI di 27 kecamatan kabupaten Sumenep, Pagu Anggaran Rp. 192.292.000 dan terealisasi sebesar Rp. 184.484.200
 - Lomba Hari Anak Nasional Tingkat SD/MI dengan Output Terlaksananya Lomba Hari Anak Nasional Tingkat SD/MI di 27 kecamatan kabupaten Sumenep, Pagu Anggaran Rp. 61.807.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.407.000
 - Operasional UASBN SD/MI Output Terlaksananya UASBN SD/MI di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep, dengan Pagu Anggaran Rp. 125.174.500 dan terealisasi sebesar Rp. 124.036.300
 - Peningkatan Pengembangan Kurikulum (Operasionalisasi Intelegensi Cerdas Cermat SD Kab. Sumenep), dengan output Peningkatan daya saing siswa pada beberapa Mapel dengan Pagu Anggaran Rp. 70.278.750 dan terealisasi sebesar Rp. 60.078.750
 - Penyusunan dan Penggandaan Naskah US SD/MI Output Terlaksananya US SD/MI di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 225.880.000 dan terealisasi sebesar Rp. 218.226.000
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK) Output Terlaksananya Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Bantuan Rehab dengan Pagu Anggaran Rp. 22.580.145.500 dan terealisasi sebesar Rp. 14.980.490.500
 - Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Output Terlaksananya Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar dengan Pagu Anggaran Rp. 50.605.500 dan terealisasi sebesar Rp. 50.605.500
 - Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar Output Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan Baik dengan Pagu Anggaran Rp. 344.713.746 dan terealisasi sebesar Rp. 344.713.500

- Sekolah Rujukan Mutu Output Terlaksananya Sekolah Rujukan Mutu Tingkat SD/MI di 27 kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 1.087.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.016.450.000
- Pengiriman Kontingen POR SD Output Terlaksananya Pengiriman Kontingen Peserta Lomba Pekan Olahraga SD dengan Pagu Anggaran Rp. 230.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 191.800.000
- Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Output Terlaksananya Pengiriman Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dengan Pagu Anggaran Rp. 78.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.610.000
- Program Peningkatan Kualitas Siswa, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Pemilihan Siswa Teladan Output Terlaksananya Pemilihan Siswa Teladan Tingkat SD/MI di 27 kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 66.036.750 dan terealisasi sebesar Rp. 43.086.750
 - Pelaksanaan Wajib Diniyah Output Terwujudnya Tingkatan Pembelajaran agama yang tinggi Tingkat SD/MI di 27 kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 1.968.159.500 dan terealisasi sebesar Rp. 708.838.850

Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar memuat tiga Program Kegiatan diantaranya adalah Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Kualitas Siswa. Semua program yang ada pada Bidang Pendidikan Dasar yang umumnya berhasil, penunjang keberhasilan yang paling dominan adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang mana keberhasilannya ditunjang oleh kinerja dan kerjasama yang maksimal serta dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua program-program yang di targetkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama, Didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Student Smart Contes (Kontes Cerdas Cermat) Output Peningkatan Daya Saing Siswa pada beberapa Mapel Tingkat SMP di 27 kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 43.415.800 dan terealisasi sebesar Rp. 42.226.600
- Program Pendidikan Menengah, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Output Terlaksananya Pengiriman Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP dengan Pagu Anggaran Rp. 119.680.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.277.800
 - Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP dan SMA Output Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP dan SMA dengan Pagu Anggaran Rp. 74.187.000 dan terealisasi sebesar Rp. 52.081.200
 - Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dan SMA Output Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dan SMA dengan Pagu Anggaran Rp. 268.727.500 dan terealisasi sebesar Rp. 254.100.000
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Output Terciptanya Lingkungan Sekolah Bersih dan sehat tingkat SMP dengan Pagu Anggaran Rp. 47.059.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.209.000

- Pemilihan Duta Sanitasi Output Terpilihnya Duta Sanitasi pada pelajar SMP dengan Pagu Anggaran Rp. 33.895.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.954.525
- Pelaksanaan UNBK SMP Output Terlaksananya Ujian Nasional Berbasis Komputer pada SMP di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 1.092.020.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.080.125.000
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/SMK/MA Output Terlaksananya Jumlah Peserta Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/SMK/MA dengan Pagu Anggaran Rp. 242.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.236.213.800

Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kurikulum dan penilaian, Seksi kelembagaan dan sarana prasarana serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama memuat empat Program Kegiatan diantaranya adalah Program Kegiatan Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Semua program yang ada pada Bidang Pendidikan Menengah yang umumnya berhasil, penunjang keberhasilan yang paling dominan adalah Program Pendidikan Menengah yang mana keberhasilannya ditunjang oleh kinerja dan kerjasama yang maksimal dan dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua program-program yang di targetkan. dan hal tersebut juga ditunjang oleh minat warga masyarakat akan pentingnya pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Sasaran 3 : Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan

meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Output Jumlah Anak usia dini yang terlayani kegiatan PAUD dan kelompok bermain di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000
 - Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Output Jumlah Lembaga Penyelenggara PAUD dan kelompok bermain di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 363.693.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.393.000
 - Penyelenggaraan DAK PAUD Output Jumlah Lembaga Penyelenggara PAUD dan kelompok bermain di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.608.000
 - Diklat Lanjutan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2017 Output Jumlah Tenaga Pendidik Penyelenggara PAUD dan kelompok bermain di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 155.425.500 dan terealisasi sebesar Rp. 142.241.600
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Penyelenggaraan paket A setara SD Output Jumlah Lembaga Peserta paket A setara SD di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran 79.320.000 Rp. dan terealisasi sebesar Rp. 78.553.5000
 - Penyelenggraan paket B setara SMP Output Jumlah Lembaga Peserta paket B setara SMP di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 191.520.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.820.000
- Program Pendidikan Menengah, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Penyelenggaraan paket C setara SMU Output Jumlah Lembaga Peserta paket C setara SMU di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 350.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 329.400.000
- Program Pendidikan Non Formal, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Hari Aksara Internasional (HAI) Output Peningkatan Warga belajar pemasaran produk di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp.70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 68.494.000
 - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Output Jumlah Pegawai yang Profesional di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 105.781.250 dan terealisasi sebesar Rp. 78.370.000
 - Pemberantasan Buta Aksara Output Mengurangi Jumlah Buta Aksara di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. dan terealisasi sebesar Rp.
 - Seleksi dan Pembinaan Jambore PTKPAUDNI Output Terlaksannya Seleksi dan Pembinaan Jambore PTKPAUDNI di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 117.823.000 dan terealisasi sebesar Rp. 62.778.000,00
 - Penguatan Rumah Pintar Output Jumlah Rumah pintar di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep sehingga tercipta Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Rumah Pintar dengan Pagu Anggaran Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.983.000,00
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Lomba Olahraga dalam rangka Hari Besar Nasional Output Terlaksannya Lomba Olahraga di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 81.685.000,00 dan terealisasi sebesar 77.835.000,00,00
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Output Terlaksannya Lomba Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 136.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.150.000,00
- Pengiriman Kontingen Pekan Seni Pelajar Output Terlaksannya Pengiriman Kontingen Pekan Seni Pelajar dengan Pagu Anggaran Rp. 155.000.000,00 dan terealisasi sebesar 155.000.000,00,00
- Penampilan Seni dan Budaya Output Terlaksannya Lomba Penampilan Seni dan Budaya dengan Pagu Anggaran Rp. 45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.250.000,00

Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada sasaran Menyediakan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang belum atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan jalur sekolah, khususnya bagi masyarakat putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal dan meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini memuat lima program kegiatan yang diantaranya adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, Program Pengelolaan Keragaman Budaya . Semua program yang ada pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini yang umumnya berhasil, penunjang keberhasilan yang paling dominan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Non Formal yang mana keberhasilannya ditunjang oleh kinerja dan kerjasama yang maksimal serta dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua program-program yang di targetkan. yang mana difokuskan pada Proram Pemberantasan Buta Huruf dan hal tersebut juga ditunjang oleh minat warga masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis/ melek huruf yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih

banyak yang diterima oleh masyarakat ke jenjang selanjutnya, dan juga angka minat warga terhadap pendidikan anak usia dini semakin tinggi.

Sasaran 4: Meningkatnya pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten Output Terpilihnya Peserta Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten dengan Pagu Anggaran Rp. 38.552.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.620.500,00
 - Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi Output Terlaksannya Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi dan berdedikasi dengan Pagu Anggaran Rp. 140.000.000,00 dan terealisasi sebesar 133.520.000,00,00
 - Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Output Jumlah Calon Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik dengan Pagu Anggaran Rp. 646.297.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 350.722.500,00
 - Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Output Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar 50.000.000,00,00
 - Workshop Pembelajaran Berbasis IT Output Terjadinya Peningkatana Kinerja Guru di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 62.602.500,00 dan terealisasi sebe 62.602.500,00
 - Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Output Guru dan Kepala Sekolah dapat terlatih untuk pemahaman dan peningkatan mutu pendidikan dengan Pagu Anggaran Rp. 7.015.374.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.006.534.000,00
 - Percepatan Penguatan Tenaga Pengawas Sekolah Output Tenaga Pengawas Sekolah dapat terlatih untuk pemahaman

dan peningkatan mutu pendidikan dengan Pagu Anggaran Rp. 435.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 401.575.000,00

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Output Terlaksananya Pembinaan Kepangkatan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Pamong Belajar dengan Pagu Anggaran Rp. 119.864.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.514.000,00

Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada sasaran Meningkatnya pengawasan dan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah memuat dua program kegiatan yang diantaranya adalah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Semua program yang ada pada Bidang Ketenagaan yang umumnya berhasil, penunjang keberhasilan yang paling dominan adalah pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana keberhasilannya ditunjang oleh kinerja dan kerjasama yang maksimal serta dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua program-program yang di targetkan. yang mana difokuskan pada Peningkatan Mutu pendidikan serta Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik, program Kegiatan tersebut menumbuhkan minat kembang tenaga pendidik akan peningkatan mutu tenaga pendidikan.

Sasaran 5 : Meningkatnya sistem penyelenggaraan pembantuan Pada tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Operasional Tim Manajemen BOS SD, SMP Output terlaksananya pelaporan Operasional Tim Manajemen di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 89.110.000,00

- Kegiatan Operasional ICT Dinas Pendidikan Output Terpenuhinya layanan data Pendidikan Kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 54.753.600,00 dan terealisasi sebesar 54.753.600,00,00
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Output Kualitas Siswa Meningkat di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 59.331.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.223.102.208,00
- BOP Bosda Madin Kualitas Siswa Meningkat di bidang keagamaan di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.150.000,00
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pendidikan Output Tersedianya Dana Ganti rugi tanah sekolah dengan Pagu Anggaran Rp. 73.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0 di akibatkan tidak adanya tanah yang dibebaskan di karenakan tidak ada lahan lembaga sekolah yang sengketa
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Lalu Output Jumlah SD/SMP yang mendapatkan bantuan rehab dan peningkatan mutu dengan Pagu Anggaran Rp. 2.913.731.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.346.991.450,00
- Program Peningkatan Kualitas Siswa, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :
 - Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Output terlaksananya Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di 27 Kecamatan kabupaten Sumenep dengan Pagu Anggaran Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.811.500,00
 - Pembangunan Gelanggang Sains dan Seni Output Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan dengan Pagu Anggaran Rp. 46.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.240.000,00
 - Motivasi Prestasi Siswa Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional Output Tercapainya peningkatan Prestasi Siswa

Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.500.000,00

- Pemilihan Dan Pengiriman Siswa Berprestasi (Siswa Teladan) Output terlaksananya seleksi Pemilihan Dan Pengiriman Siswa Berprestasi (Siswa Teladan) dengan Pagu Anggaran Rp. 38.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.208.750,00

Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada sasaran Meningkatnya sistem penyelenggaraan pembantuan memuat tiga program kegiatan yang diantaranya adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Kualitas Siswa. Semua program yang ada pada Bagian Pembantuan yang umumnya berhasil, penunjang keberhasilan dal program tersebut ditunjang oleh kinerja dan kerjasama yang maksimal serta dana yang mencukupi untuk melaksanakan semua program-program yang di targetkan. yang mana difokuskan pada Kegiatan pembantuan pada setiap-setiap bidang dalam hal pencairan dana bos dan Dana Alokasi Khusus sehingga semua kegiatan dan program di setiap bidang dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Adapun kegagalan program yang tidak teralisasi adalah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pendidikan, disebabkan tidak adanya lahan yang akan di bebaskan dan tidak adanya lahan Lembaga sekolah yang di sengketa untuk di ganti rugi.

Dapat disimpulkan bahwa dari kelima sasaran Dinas Pendidikan tersebut dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2017 tergolong sangat berhasil dan tidak ada satupun yang mengalami kegagalan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 didukung dengan sejumlah dana dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi dana	Capaian/Realiasasi	%
1	Pendapatan	66.700.000,00	50.374.750,00	75,52
2	Belanja Tdk Langsung	529.515.205.240,00	494.586.124.320,00	93,40
3	Belanja Langsung	126.003.559.871,00	112.262.495.868,00	89,09

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan ini diperoleh dari sewa Gedung Pertemuan Ki Hajar Dewantara dan sewa perumahan Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah SD selama satu tahun anggaran (Januari s/d Desember 2017) total penerimaan, sebesar Rp. 50.374.750,00 dengan nilai capaian 75,52%.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Dinas Pendidikan Kab. Sumenep. Pada tahun anggaran 2017 (Januari s/d Desember 2017), realisasi/total pengeluaran Sebesar Rp. 494.586.124.320,00 dengan nilai capaian 93,40 %

3. Belanja langsung

Realisasi Belanja langsung meliputi belanja program pembangunan dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2017 (Januari s/d Desember 2017) realisasi/total pengeluaran Sebesar 112.262.495.868,00 dengan nilai capaian 89,30%. Untuk lebih jelasnya realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Perubahan APBD 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA LANGSUNG	103.058.585.996,00	89.416.533.633,00	86,76
Program Pendidikan Anak Usia Dini	292.118.500,00	243.242.600,00	83,27
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran	36.693.000,00	17.393.000,00	47,40
Penyelenggaraan DAK PAUD	50.000.000,00	33.608.000,00	67,22
Diklat Lanjutan Bagi Pendidik PAUD Tahun 2017	155.425.500,00	142.241.600,00	91,52
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	60.250.161.650,00	58.089.572.158,00	96,41
Penyelenggaraan paket A setara SD	79.320.000,00	78.553.500,00	99,03
Penyelenggaraan paket B setara SMP	191.520.000,00	190.820.000,00	99,63
Lomba Olimpiade Mata Pelajaran Siswa dan Olimpiade MIPA	192.292.000,00	184.484.200,00	95,94
Lomba Hari Anak Nasional Tingkat SD/MI	61.807.000,00	42.407.000,00	68,61
Student Smart Contes (Kontes Cerdas Cermat)	43.415.800,00	42.226.600,00	97,26
Operasional UASBN SD/MI	125.174.500,00	124.036.300,00	99,09
Operasional Tim Manajemen BOS SD, SMP	100.000.000,00	89.110.000,00	89,11
Kegiatan Operasional ICT Dinas Pendidikan	54.753.600,00	54.753.600,00	100
Peningkatan Pengembangan Kurikulum (Operasionalisasi Intelegensi Cerdas Cermat SD Kab. Sumenep)	70.278.750,00	60.078.750,00	85,49
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.331.600.000,00	57.223.102.208,00	96,45
Program Pendidikan Menengah	812.594.500,00	705.859.000,00	86,86
Penyelenggaraan paket C setara SMU	350.000.000,00	329.400.000,00	94,11
Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP	119.680.000,00	70.277.800,00	58,72
Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP dan SMA	74.187.000,00	52.081.200,00	70,20
Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dan SMA	268.727.500,00	254.100.000,00	94,56
Program Pendidikan Non Formal	1.418.604.250,00	1.232.011.250,00	86,85
Hari Aksara Internasional (HAI)	70.000.000,00	68.494.000,00	97,85
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	105.781.250,00	78.370.000,00	74,09
Pemberantasan Buta Aksara	1.000.000.000,00	897.386.250,00	89,74
Seleksi dan Pembinaan Jambore PTKPAUDNI	117.823.000,00	62.778.000,00	53,28
Penguatan Rumah Pintar	125.000.000,00	124.983.000,00	99,99
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.388.626.500,00	8.031.574.500,00	95,74
Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten	38.552.500,00	26.620.500,00	69,05
Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi	140.000.000,00	133.520.000,00	95,37
Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik	646.297.500,00	350.722.500,00	54,27
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Workshop Pembelajaran Berbasis IT	62.602.500,00	62.602.500,00	100
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan	7.015.374.000,00	7.006.534.000,00	99,87
Percepatan Penguatan Tenaga Pengawas Sekolah	435.800.000,00	401.575.000,00	92,15

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	28.758.534.346,00	19.357.540.975,00	67,31
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	119.864.000,00	70.514.000,00	58,83
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK)	22.580.145.500,00	14.980.490.500,00	66,34
BOP Bosda Madin	100.000.000,00	96.150.000,00	96,15
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Lalu	2.913.731.600,00	1.346.991.450,00	46,23
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar	50.605.500,00	50.605.500,00	100
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pendidikan	73.000.000,00	-	0
Lomba Lingkungan Sekolah Sehat	47.059.000,00	45.209.000,00	96,07
Monitoring Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	90.000.000,00	77.811.500,00	86,46
Pemilihan Duta Sanitasi	33.895.000,00	29.954.525,00	88,37
Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Bidang Pendidikan Dasar	344.713.746,00	344.713.500,00	100
Sekolah Rujukan Mutu	1.087.620.000,00	1.016.750.000,00	93,48
Pelaksanaan UNBK SMP	1.092.020.000,00	1.080.125.000,00	98,91
Penyusunan dan Penggandaan Naskah US SD/MI	225.880.000,00	218.226.000,00	96,61
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	390.135.000,00	329.245.000,00	84,39
Lomba Olahraga dalam rangka Hari Besar Nasional	81.685.000,00	77.835.000,00	95,29
Pengiriman Kontingen POR SD	230.050.000,00	191.800.000,00	83,37
Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	78.400.000,00	59.610.000,00	76,03
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	242.000.000,00	236.213.800,00	97,61
Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/SMK/MA	242.000.000,00	236.213.800,00	97,61
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	336.750.000,00	316.400.000,00	93,96
Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar	136.750.000,00	118.150.000,00	86,40
Pengiriman Kontingen Pekan Seni Pelajar	155.000.000,00	155.000.000,00	100
Penampilan Seni dan Budaya	45.000.000,00	43.250.000,00	96,11
Program Peningkatan Kualitas Siswa	2.169.061.250,00	874.874.350,00	40,33
Pemilihan Siswa Teladan	66.036.750,00	43.086.750,00	65,25
Pembangunan Gelanggang Sains dan Seni	46.200.000,00	44.240.000,00	95,76
Motivasi Prestasi Siswa Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00
Pemilihan Dan Pengiriman Siswa Berprestasi (Siswa Teladan)	38.665.000,00	29.208.750,00	75,54
Pelaksanaan Wajib Diniyah	1.968.159.500,00	708.838.850,00	36,02

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 ini, dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Keputusan Bupati Nomor : 28 Tahun 2008 tentang : Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.

Pertanggungjawaban tersebut meliputi Pengelolaan dan Pengendalian Dana dan Sumber Daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan, program dan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep


Berdasarkan rata-rata dari analisis pencapaian Kinerja dan sasaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir cukup baik, yakni : memperoleh nilai baik.

B. Tinjauan Khusus

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan ini masih belum optimal, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) dan dana pendampingan untuk rehabilitasi sedang/ berat sekolah baik pada jenjang SD dan SMP serta SMK dan juga pengadaan alat peraga untuk siswa., permasalahan perlu adanya koreksi dan penjadwalan ulang sehingga tidak merugikan pendidikan dimasa yang akan datang, dengan menjadwal ulang dan memprogramkan kembali pada tahun anggaran 2018.

C. Saran Tindak Lanjut

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan ini masih belum optimal, masih terdapat persentase yang belum dicapai, untuk itu kami mengharap untuk tahun mendatang Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018, khususnya Kegiatan yang perlu ditingkatkan agar prosentase permasalahan diminimalkan sedemikian mungkin, untuk mencapai titik yang signifikan.

Sumenep, 26 Januari 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197703 1 014

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325 Fax. 662325
SUMENEP

Kode Pos 69417

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. A. SHADIK, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, Januari 2017

Pihak Kedua,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Pihak Pertama,



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda

19581231 197703 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1.1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,03 tahun
		1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,42 Th
		1.3. Angka Melek Huruf > 15 tahun s d 55 tahun	79,70%
		1.4. Persentase jumlah sekolah terakreditasi :	
		- Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	80,30%
	- Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	76,80%	
	- Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	75,40%	

<u>Program</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,474,071,875	
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	19,571,160,000	
3. Program Pendidikan Anak Usia Dini	138,468,000	
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	918,561,650	
5. Program Pendidikan Menengah	812,594,500	
6. Program Pendidikan Non Formal	1,383,604,250	
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8,477,896,500	
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	26,765,922,746	
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	363,685,000	
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	242,000,000	
11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	305,000,000	
12. Program Peningkatan Kualitas Siswa	1,269,061,250	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung	62,722,025,771	

Sumenep, Januari 2017

